1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pada Triwulan II Tahun 2026, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Lamongan secara umum masih berada dalam kondisi **relatif terkendali**, dengan ketersediaan komoditas pangan strategis yang secara umum tetap terjaga. Namun demikian, terdapat tekanan harga pada kelompok komoditas hortikultura, khususnya **cabai**, yang menjadi salah satu komoditas penyumbang tekanan inflasi pangan di Kabupaten Lamongan selama periode Mei–Juni 2026.

   Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, cabai dan tomat merupakan komoditas hortikultura yang memiliki tingkat fluktuasi harga cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil langkah intervensi yang lebih bersifat struktural, tidak hanya melalui operasi pasar, tetapi juga dengan meningkatkan produksi cabai di tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan.

   Pada sisi komoditas pangan strategis lainnya, kondisi pasokan secara umum relatif aman. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, bawang serta komoditas pangan lainnya melalui sistem pemantauan harga dan monitoring langsung di lapangan.

   Dari sisi beras, kondisi Jawa Timur pada periode Triwulan II juga relatif kuat. Perum BULOG Kanwil Jawa Timur melaporkan telah menyerap 719.482 ton setara beras hingga 17 Mei 2026, atau sekitar 81,40 persen dari target penyerapan, dengan stok yang diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga sekitar 16 bulan. Kondisi tersebut menjadi faktor pendukung bagi stabilitas pasokan beras di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Lamongan.

   Sementara itu, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap komoditas MinyaKita. Pemerintah mempertahankan HET MinyaKita sebesar **Rp15.700/liter** dan mendorong penguatan distribusi melalui BUMN pangan agar ketersediaan di pasar rakyat tetap terjaga.

   Dengan demikian, risiko pengendalian inflasi Kabupaten Lamongan pada Triwulan II 2026 lebih banyak berasal dari **volatilitas komoditas hortikultura**, khususnya cabai, faktor cuaca, perubahan produksi, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   ### a. Ketersediaan Pasokan

   Permasalahan utama masih terdapat pada komoditas cabai yang memiliki tingkat fluktuasi harga tinggi.

   Kabupaten Lamongan memiliki basis pertanian yang kuat, tetapi tidak seluruh kebutuhan cabai masyarakat dapat dipenuhi dari produksi lokal. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan harga cabai relatif sensitif terhadap perubahan produksi, cuaca dan kondisi distribusi di daerah sentra.

   Permasalahan tersebut semakin relevan pada periode Mei–Juni 2026 ketika cabai

teridentifikasi sebagai salah satu penyumbang tekanan inflasi pangan di Lamongan.

## B. Keterjangkauan Harga

Fluktuasi harga cabai menjadi perhatian karena komoditas tersebut memiliki perubahan harga yang cepat dan dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Berbeda dengan cabai, beberapa komoditas strategis lainnya relatif dapat dikendalikan melalui dukungan pasokan dan intervensi pemerintah.

Oleh karena itu, pengendalian harga perlu diarahkan tidak hanya pada saat harga sudah tinggi, tetapi dilakukan sejak terdapat indikasi penurunan pasokan.

## C. Kelancaran Distribusi

Ketergantungan sebagian komoditas terhadap pasokan luar daerah menyebabkan kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

Gangguan distribusi, kenaikan biaya angkut maupun keterlambatan pasokan dapat memperbesar disparitas harga antara produsen dan konsumen.

Karena itu, kerja sama antar daerah serta koordinasi dengan distributor dan BUMN pangan perlu terus diperkuat.

## D. Komunikasi Efektif

Pemantauan harga yang cepat dan akurat diperlukan agar pemerintah dapat menentukan langkah intervensi secara tepat waktu.

Kabupaten Lamongan telah memiliki **SIPULDABAPOK**, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyebarkan data harga bahan pokok harian sebagai salah satu dasar pengendalian harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama TPID melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui **4K**, sebagai berikut:

### 1. Ketersediaan Pasokan

Upaya yang dilakukan meliputi:

- pemantauan stok Bapokting secara berkala;
- koordinasi dengan BULOG dalam menjaga ketersediaan beras;
- monitoring ketersediaan komoditas pangan strategis di pasar;
- penguatan produksi pangan lokal;
- pengembangan tanaman hortikultura;
- pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan;
- penguatan produksi cabai sebagai komoditas yang memiliki volatilitas tinggi.

Langkah strategis pada akhir Triwulan II adalah pelaksanaan **GAS PAK CAMAT (Gerakan Serentak di Pekarangan Tanam Cabai dan Tomat)**.

Pada 25–26 Juni 2026 telah diserahkan **1.890 bibit cabai rawit, 1.890 bibit cabai besar dan 1.890 bibit tomat** kepada 27 kecamatan. Selanjutnya pada 29 Juni 2026 dilakukan gerakan penanaman secara serentak di seluruh kecamatan.

Program ini merupakan perubahan pendekatan yang penting, dari intervensi yang sebelumnya lebih dominan dilakukan di sisi hilir menjadi penguatan pasokan dari sisi hulu.

**2. Keterjangkauan Harga**

Upaya keterjangkauan harga pada Triwulan II merupakan kelanjutan dari intervensi yang telah dilakukan pada Triwulan I.

Pada awal Triwulan II, dampak pelaksanaan Operasi Pasar Murah Ramadan dan Idulfitri menjadi salah satu instrumen dalam menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap harga Bapokting dan melakukan koordinasi apabila terdapat komoditas yang mengalami kenaikan signifikan.

Strategi tersebut sejalan dengan pendekatan pengendalian inflasi pangan Jawa Timur melalui **Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)** yang mengedepankan empat aspek utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

**3. Kelancaran Distribusi**

Pengendalian distribusi dilakukan melalui:

- pemantauan distribusi Bapokting;
- koordinasi dengan distributor;
- koordinasi dengan BULOG;
- pengawasan ketersediaan beras SPHP;
- koordinasi dengan pemerintah provinsi;
- pemantauan harga di pasar rakyat;
- serta penguatan kerja sama antar daerah.

Dari sisi pasokan beras, kondisi Jawa Timur relatif kuat dengan penyerapan BULOG yang telah mencapai 719.482 ton setara beras per 17 Mei 2026. Kondisi tersebut memberikan dukungan terhadap stabilitas pasokan beras regional.

Pada komoditas MinyaKita, pemerintah juga menempatkan penguatan distribusi sebagai prioritas, dengan mempertahankan HET Rp15.700/liter dan mendorong penyaluran melalui BUMN pangan.

**4. Komunikasi Efektif**

Komunikasi efektif dilaksanakan melalui:

- koordinasi TPID;
- monitoring harga harian;

koordinasi antar-OPD;
- pemantauan langsung pasar;
- koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- koordinasi dengan BULOG;
- penyampaian informasi harga kepada masyarakat;
- serta pemanfaatan SIPULDABAPOK sebagai salah satu sumber data harga.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor juga dilakukan melalui forum TPID. Pada 26 Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengikuti **High Level Meeting TPID dan TP2DD se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya**, sebagai bagian dari penguatan sinergi pengendalian inflasi daerah dan stabilitas ekonomi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa strategi 4K telah dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dari sisi Ketersediaan Pasokan, kondisi sebagian besar komoditas pangan strategis relatif aman. Namun, cabai masih menjadi komoditas yang memerlukan perhatian khusus karena tingkat volatilitasnya tinggi.

Intervensi melalui "**GAS PAK CAMAT"** merupakan langkah strategis karena tidak hanya bertujuan mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi juga membangun sumber pasokan alternatif dari tingkat rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara eksplisit menyebut bahwa gerakan tersebut ditujukan untuk mengendalikan inflasi khususnya cabai, memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.

Dari sisi Keterjangkauan Harga, operasi pasar dan pemantauan harga tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dari sisi Kelancaran Distribusi, dukungan BULOG dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta pelaku distribusi membantu menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis.

Sementara dari sisi Komunikasi Efektif, penggunaan sistem informasi harga dan koordinasi lintas OPD menjadi dasar bagi TPID dalam melakukan identifikasi komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga.

Namun demikian, evaluasi Triwulan II menunjukkan bahwa pengendalian cabai perlu memperoleh perhatian lebih besar pada aspek hulu. Hal ini karena operasi pasar hanya bersifat stabilisasi jangka pendek, sedangkan permasalahan pasokan cabai bersifat berulang.

Oleh sebab itu, kebijakan GAS PAK CAMAT perlu dikembangkan menjadi bagian dari strategi jangka menengah pengendalian inflasi cabai Kabupaten Lamongan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**a. Penguatan Produksi Cabai dan Holtikultura**

-

Melanjutkan GAS PAK CAMAT dengan:

- pemetaan lokasi penanaman;
- pendataan kelompok/rumah tangga pelaksana;
- pendampingan budidaya;
- penyediaan sarana produksi;
- pengaturan pola tanam;
- pemantauan produktivitas;
- dan pengembangan kawasan/sentra cabai binaan TPID.

Program ini perlu dikembangkan dari sekadar gerakan penanaman menjadi **p**rogram produksi cabai berkelanjutan.

**b. Penguatan KAD**

Membangun kerja sama pasokan dengan daerah sentra produksi cabai sehingga ketika produksi lokal mengalami penurunan, pasokan dari luar daerah dapat segera masuk.

**c. Penguatan *Bufer Supply***

Mendorong penyediaan cadangan pasokan cabai dan komoditas strategis lainnya sebelum periode yang diprediksi mengalami peningkatan permintaan atau penurunan produksi.

d. Penguatan *Early Warning System*

Sebagai pengembangan rekomendasi Triwulan IV 2025, kenaikan harga perlu langsung dikaitkan dengan tindakan TPID sehingga respons tidak menunggu harga mencapai level yang terlalu tinggi.

**e. Penguatan Peran BUMD/ Perumda Pasar**

Perumda Pasar dapat didorong sebagai off-taker/aggregator komoditas cabai hasil produksi lokal maupun pasokan dari daerah mitra.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi memiliki instrumen untuk mengamankan pasokan dan melakukan stabilisasi ketika terjadi gejolak.

f. Penguatan Operasi Pasar Berbasis *Early Warning*

Operasi pasar tetap diperlukan, tetapi diarahkan berdasarkan:

- kenaikan harga;
- disparitas harga;
- tingkat ketersediaan;
- serta hasil pemantauan pasokan.

Dengan demikian, operasi pasar menjadi intervensi terukur, bukan hanya kegiatan rutin berdasarkan kalender HBKN.